

Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Transparansi, dan Komitmen Organisasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Desa di Kabupaten Samosir)

Anggiat Situngkir^{1*}, Benny Irawaty Simarmata²

^{1,2}Politeknik Negeri Medan, Medan. Indonesia

anggiatsitungkir@polmed.ac.id

Abstract

This study aims to determine the effect of village apparatus competence, transparency, and organizational commitment on village fund management accountability. The population of this research is all villages in Samosir Regency, totaling 128 villages. The research sample was 40 villages with 120 people consisting of the Village Head, Village Secretary, and Head of Finance as respondents. This study uses a non-probability sampling method, namely purposive sampling, with the type of quantitative research. The data used are primary data obtained through direct questionnaires to respondents. The independent variables used are village apparatus competence (KAD), transparency (T), and organizational commitment (KO). The dependent variable used is accountability (A). This study uses multiple linear regression analysis using SPSS 25 test tool. Based on the partial test results in this study, it shows that village apparatus competence, transparency, and organizational commitment have a significant effect on village fund management accountability. This is evidenced by the significant value of the competence of the village apparatus partially (t test) of 0.002, the significant value of transparency is 0.000, and the significant value of organizational commitment is 0.000. Then simultaneously, this study shows that village apparatus competence, transparency, and organizational commitment have a significant effect with a simultaneous significance value (F test) of 0.000.

Keywords: *Accountability, Competence, Transparency, Commitment*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur desa, transparansi, dan komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Populasi penelitian ini adalah seluruh desa di Kabupaten Samosir yang berjumlah 128 desa. Sampel penelitian sebanyak 40 desa dengan 120 orang yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kaur Keuangan sebagai responden. Penelitian ini menggunakan metode *non-probability sampling* yaitu *purposive sampling*, dengan jenis penelitian kuantitatif. Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner langsung kepada responden. Variabel independen yang digunakan yaitu kompetensi aparatur desa (KAD), transparansi (T), dan komitmen organisasi (KO). Variabel dependen yang digunakan adalah akuntabilitas (A). Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dengan menggunakan alat uji SPSS 25. Berdasarkan hasil uji secara parsial dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa, transparansi, dan komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan kompetensi aparatur desa secara parsial (uji t) sebesar 0.002, nilai signifikan transparansi 0.000, dan nilai signifikan komitmen organisasi sebesar 0.000. Kemudian secara simultan, penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa, transparansi, dan komitmen organisasi berpengaruh signifikan dengan nilai signifikansi secara simultan (uji F) sebesar 0.000.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Kompetensi, Transparansi, Komitmen.

PENDAHULUAN

Desa mempunyai peran strategis untuk membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan termasuk pembangunan. Dalam rangka terwujudnya desentralisasi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dimana wewenang dalam mengelola keuangan telah dilimpahkan ke desa supaya mengalokasikan dana yang sudah diturunkan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk melindungi dan menciptakan pemerintah desa yang berkompeten, terbuka dan bertanggungjawab dalam menciptakan kesejahteraan masyarakatnya dan memberi kemajuan ekonomi masyarakat. Besarnya peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh sebab itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana segala akhir aktivitas

penyelenggaraan pemerintahan desa sebaiknya dapat dipertanggungjawabkan terhadap masyarakat desa.

Kabupaten Samosir merupakan salah satu dari 33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara yang terbentuk atas diberlakukannya kebijakan otonomi daerah. Pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Samosir memperoleh Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) terbaik pertama di Provinsi Sumatera Utara, dan menjadi utusan ke tingkat nasional untuk bersaing dengan kabupaten-kabupaten lainnya. Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) pada Provinsi Sumatera Utara, ternyata masih banyak desa dengan status tertinggal dan bahkan sangat tertinggal. Salah satunya Kabupaten Samosir dengan jumlah 128 desa, dan rata-rata status dari desa tersebut adalah tertinggal. Sementara Dana Desa di Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 mencapai Rp109 Miliar. Jumlah ini mengalami kenaikan signifikan dibanding tahun anggaran sebelumnya yang hanya Rp90,9 Miliar (<https://medanbisnisdaily.com>, 2018). Pembangunan infrastruktur yang kurang merata dirasakan oleh beberapa desa, terlebih desa-desa yang berada di dataran tinggi Kabupaten Samosir. Padahal jumlah penduduk desa yang berada di dataran tinggi bukanlah sedikit. Pemanfaatan dana desa di Kabupaten Samosir belum maksimal, hal ini diperkuat dengan masih adanya dugaan kasus korupsi yang ditemukan serta pembangunan infrastruktur yang kurang merata, ([Pinterest.com](https://www.pinterest.com), 2019).

Berdasarkan hasil pengamatan ICW (*Indonesia Corruption Watch*) saat ini pemerintah desa baik dalam menjalankan pemerintahannya maupun dalam mengelola keuangannya masih banyak ditemui belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang saat ini telah dimuat dalam Pedoman PKD (Pengelolaan Keuangan Desa) Tahun 2021. Data ICW menunjukkan bahwa ada sebanyak 288 kasus korupsi anggaran desa yang terjadi mulai tahun 2016 sampai tahun 2019 (CNN Indonesia, 17 November 2019). Adanya korupsi dana desa diatas menunjukkan kurangnya akuntabilitas/pertanggungjawaban pengelolaan dana desa oleh perangkat desa. Korupsi dana desa dapat menyebabkan rendahnya tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa yang didasari oleh beberapa alasan. Beberapa alasan tersebut seperti yang diungkapkan oleh Dewi (2019), Aziiz (2019), Lutfhi (2018), yaitu kompetensi sumber daya manusia, transparansi, partisipasi masyarakat desa, pengawasan, komitmen organisasi, dan evaluasi kinerja.

Faktor utama yang berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah kompetensi sumber daya manusia atau pengelola dana desa itu sendiri. Salah satu yang menyebabkan tingginya penyelewengan dana desa adalah kurangnya kompetensi dari pengelola dana itu sendiri yaitu pemerintah desa. Kompetensi merupakan faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas. Untuk meningkatkan akuntabilitas diperlukan adanya kompetensi (Mada, 2017). Menurut Linda (2013) Kompetensi yang dimiliki tidak sempurna tanpa integritas. Sehingga integritas dibutuhkan dalam kompetensi pengelola dana desa.

Faktor selanjutnya adalah dibutuhkan transparansi atau keterbukaan didalam pengelolaan dana desa. Prinsip atau asas transparansi sendiri adalah sikap membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa dalam setiap tahapannya, baik dalam perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban, maupun hasil pemeriksaan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia desa (Mada, 2017).

Faktor lain yang mempengaruhi akuntabilitas adalah komitmen organisasi pemerintah desa. Agar kinerja semakin optimal diperlukan adanya pemerintah desa yang memiliki komitmen yang kuat. Komitmen organisasi merupakan sikap sejauh mana seorang individu mengenal

dan terikat kepada organisasinya (Griffin, 2019). Karyawan yang lebih berkomitmen memiliki kebiasaan dapat diandalkan, berencana lebih lama untuk bekerja, dan mengupayakan lebih banyak tenaga untuk pekerjaannya. Ketika pemerintah desa memiliki komitmen yang kuat untuk mengoptimalkan kinerjanya dalam mengelola dana desa maka pengelolaan dana desa akan semakin akuntabel (Dewi, 2019).

KAJIAN PUSTAKA

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan memandang jika agen memiliki keunggulan informasi dibandingkan prinsipal dan kepentingan agen dengan prinsipal berbeda, artinya adalah akan terjadi *principal-agent problem* dimana agen akan melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya sendiri. Hubungan teori keagenan terdapat dalam pengelolaan dana desa melalui hubungan antara masyarakat sebagai prinsipal dan aparat pemerintah desa sebagai agen. Salah satu prinsip dalam pengelolaan keuangan dana desa adalah akuntabilitas. Akuntabilitas dalam hal ini menunjukkan kewajiban dari *agent* atau pihak penerima amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, melaporkan, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitas yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak yang memberikan amanah (*principal*).

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Kata akuntabilitas berasal dari bahasa inggris yaitu *Accountability* yang artinya keadaan yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Rahmah (2015:62) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada BPD dan atasan kepala desa, tetapi juga kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Akuntabilitas yaitu pemerintah desa mengelola keuangan sesuai aturan dan prosedur yang sudah ada. Pengelolaan keuangan desa yang akuntabel merupakan pengelolaan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan desa. Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dalam konsep akuntansi sektor publik.

Pengelolaan dana desa merupakan upaya untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pengelolaan keuangan dana merupakan suatu siklus yang terdiri dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan, pelaporan serta pemantauan dan evaluasi (Kurnianingrum, 2021). Untuk mewujudkan tata kelola yang baik dalam sistem penyelenggaraan desa, pengelolaan dana/keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yang transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran.

Kompetensi Aparatur Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu, yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dapat disimpulkan kompetensi mencakup kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas dengan baik yang dilandasi oleh keterampilan, sikap dan pengetahuan.

Kompetensi individu berpengaruh terhadap keberhasilan organisasi. Individu yang memiliki kompetensi tinggi memiliki kinerja yang tinggi sedangkan individu yang memiliki kompetensi rendah akan menghasilkan kinerja yang rendah. Simbolon (2020) menyatakan dalam setiap individu seseorang terdapat karakteristik kompetensi dasar yaitu : (1) watak (*traits*) yaitu sikap perilaku atau bagaimanakah orang tersebut merespon sesuatu dengan cara

tertentu. Misalnya percaya diri (*self confidence*), kontrol diri (*self control*), ketabahan atau daya tahan (*hardiness*); (2) motif (*motive*), yaitu sesuatu yang diinginkan seseorang atau secara konsisten dipikirkan dan diinginkan yang mengakibatkan suatu tindakan atau dasar dari dalam yang bersangkutan untuk melakukan suatu tindakan; (3) bawaan (*self concept*) adalah sikap dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang. Sikap dan nilai tersebut dapat diukur melalui tes untuk mengetahui nilai (*value*) yang dimiliki, apa yang menarik seseorang untuk melakukan sesuatu. (4) pengetahuan (*knowledge*) yaitu informasi yang dimiliki seseorang pada bidang tertentu atau pada area tertentu. (5) keterampilan atau keahlian (*skill*), yaitu kemampuan untuk melaksanakan tugas tertentu baik secara fisik maupun mental.

H1: Terdapat pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Transparansi

Salah satu unsur utama dalam pengelolaan keuangan yang baik adalah dengan adanya transparansi. Menurut Rahmah, transparansi adalah salah satu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Dengan demikian asas transparansi menjamin hak semua pihak untuk mengetahui seluruh proses dalam setiap tahapan serta menjamin akses semua pihak terhadap informasi terkait pengelolaan keuangan desa. Mahmudi (2015) menyatakan Transparansi adalah pemberian pelayanan publik harus bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. Jumari (2020) menyatakan Transparansi adalah bentuk keterbukaan dalam memberikan informasi oleh pemerintah kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi yang berhubungan dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Dari pengertian di atas kita bisa memahami bahwa transparansi itu merupakan sesuatu hal yang nyata, jelas, dan terbuka dan merupakan sesuatu hal yang tidak tersembunyi. Transparansi penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah saat ini memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai yang dikerjakannya kepada publik.

H2: Terdapat pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa di Kabupaten Samosir

Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi adalah perasaan identifikasi, pelibatan, dan loyalitas dinyatakan oleh pekerja terhadap perusahaan (Wibowo, 2017). Menurut Griffin komitmen organisasi adalah sikap yang mencerminkan sejauh mana seseorang individu mengenal dan terikat pada organisasinya. Seseorang yang memiliki komitmen tinggi pada perusahaan kemungkinan akan melihat dirinya sebagai anggota sejati dalam organisasi.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan dalam komitmen organisasi adalah kesungguhan dan keinginan yang kuat dari dalam diri karyawan untuk mencapai tujuan organisasi, dimana adanya ikatan emosional terhadap organisasi, keinginan untuk tetap bertahan dalam suatu organisasi tertentu dan penerimaan nilai-nilai serta tujuan organisasi. Hal terpenting dalam komitmen organisasi ini adalah kelayakan dan kesungguhan dengan melibatkan diri secara penuh dalam kelangsungan organisasi. Orang yang merasa puas dengan pekerjaan yang diembannya maka akan sedikit lebih tinggi komitmen nya terhadap organisasi. Di dalam pemerintahan desa, tujuan yang paling utama organisasi pemerintahan desa adalah bagaimana mengelola serta mengalokasikan dana desa dengan baik sesuai

dengan anggaran dan rencana anggaran yang telah disepakati. Hal yang dibutuhkan dalam tujuan ini adalah adanya komitmen yang kuat dari seluruh perangkat desa itu sendiri. Perangkat desa harus memiliki tekad dan kesungguhan yang kuat untuk selalu berkomitmen mencapai tujuan organisasi, melibatkan diri secara penuh terhadap tanggungjawab untuk akuntabilitas yang baik.

H3: Terdapat pengaruh komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa di Kabupaten Samosir

METODE

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh desa yang ada di Kabupaten Samosir yaitu 128 desa. Dan untuk memudahkan penelitian dan keterbatasan waktu serta materi, maka peneliti mengambil sampel sebanyak 40 desa dengan jumlah responden 120 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non probability sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel (Sugiyono). Jenis *non probability sampling* yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara *purposive sampling*. Adapun kriteria penentuan sampel dalam penelitian ini yaitu perangkat desa yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, dan kepala urusan keuangan yang memiliki masa kerja minimal 1 tahun, berdasarkan jumlah penduduk yang paling banyak di Kabupaten Samosir. Dan desa yang berada di dataran tinggi Kabupaten Samosir. Jenis pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data melalui dokumentasi yaitu data berupa foto perangkat desa dalam pengisian kuesioner. Data sekunder di dalam penelitian ini adalah data tentang gambaran umum Kabupaten Samosir yang di peroleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pemberdayaan Desa Kabupaten Samosir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Besarnya koefisien regresi X_1 (Kompetensi Aparatur Desa), yang berarti setiap peningkatan X_1 sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan Y sebesar 0,294 atau 29,4% dengan asumsi variabel bebas lainnya (X_2, X_3) konstan. Jika variabel kompetensi aparatur desa meningkat maka akuntabilitas akan meningkat (jika variabel kompetensi aparatur desa memiliki arah hubungan positif dengan akuntabilitas). $b_2 = 0,336$ adalah besarnya koefisien regresi X_2 (Transparansi), yang berarti setiap kenaikan X_2 sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan Y sebesar 0,336 atau 33,6% dengan asumsi variabel bebas lainnya (X_1, X_3) konstan.

Tabel 1 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized		Coefficients ^a		t	Sig.	Collinearity Statistics	
		Coefficients		Coefficients				Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta					
1	(Constant)	.621	.377			1.646	.102		
	TRANS_X1	.294	.042	.438		7.070	.000	.861	1.162
	TRANS_X2	.336	.058	.375		5.831	.000	.799	1.252
	TRANS_X3	.214	.053	.248		4.034	.000	.871	1.148

Sumber: Hasil Pengujian Data SPSS (Lampiran)

Dari Tabel 1 dapat dirumuskan suatu persamaan yang menggambarkan hubungan antara kompetensi aparatur desa, transparansi, komitmen organisasi dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 \cdot X_1 + b_2 \cdot X_2 + b_3 \cdot X_3$$

$$Y = 0,621 + 0,294 X_1 + 0,336 X_2 + 0,214 X_3$$

Keterangan:

X₁ = Kompetensi Aparatur Desa

X₂ = Transparansi

X₃ = Komitmen Organisasi

a = 0,621 adalah bilangan konstanta

b₁ = 0,294 adalah besarnya koefisien regresi

Jika variabel transparansi meningkat maka akuntabilitas akan meningkat (jika variabel transparansi memiliki arah hubungan positif dengan akuntabilitas). b₃ = 0,214 adalah besarnya koefisien regresi X₃ (Komitmen Organisasi), yang berarti setiap kenaikan X₃ sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan Y sebesar 0,214 atau 21,4% dengan asumsi variabel bebas lainnya (X₁, X₂) konstan. Jika variabel komitmen organisasi meningkat maka akuntabilitas akan meningkat (jika variabel komitmen organisasi memiliki arah hubungan positif dengan akuntabilitas).

Tabel 2 Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.621	.377		1.646	.102		
TRANS_X1	.294	.042	.438	7.070	.000	.861	1.162
TRANS_X2	.336	.058	.375	5.831	.000	.799	1.252
TRANS_X3	.214	.053	.248	4.034	.000	.871	1.148

Sumber: Hasil Pengujian Data SPSS (Lampiran)

Tabel 2 menunjukkan bahwa hipotesis pertama diketahui untuk variabel kompetensi aparatur desa (X₁) t hitung = 7,070 > t tabel = 1,658 dan sig 0,000 < 0,05 artinya variabel kompetensi aparatur desa memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hipotesis yang kedua untuk variabel transparansi (X₂) t hitung = 5,831 > t tabel = 1,658 dan sig 0,000 < 0,05 artinya variabel transparansi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hipotesis yang ketiga untuk variabel komitmen organisasi (X₃) t hitung = 4,034 > t tabel = 1,658 dan sig 0,000 < 0,05 artinya variabel komitmen organisasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Pada variabel ini hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Hal tersebut diketahui dengan nilai t hitung = 7,070 > t tabel = 1,658 dan sig 0,000 < 0,05. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mada (2017) yang menyatakan Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, hal ini juga sejalan dengan Riadul (2018) yang menyatakan bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Dewi (2019), Aulia (2018), Medianti (2018), Umaira (2019) menyatakan terdapat pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurkhasanah (2019) yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini berarti kompetensi aparatur desa yang baik dalam suatu desa dapat meningkatkan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana desa tersebut.

Pengaruh Transparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Pada variabel ini hasil penelitian menunjukkan bahwa Transparansi berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Hal tersebut diketahui dengan nilai t hitung = 5,831 > t tabel = 1,658 dan $\text{sig } 0,000 < 0,05$. Transparansi pada desa di Kabupaten Samosir sudah tergolong baik, ditandai dengan hasil kuesioner yang menjelaskan segala informasi yang berkaitan dengan program-program desa dan alokasi dana desa dapat diketahui oleh masyarakat walaupun bukan dari website terkhusus tetapi melalui media publikasi lainnya seperti baliho, email, adanya siskeudes, arsip di kantor desa, dan keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana anggaran dimana masyarakat juga diikutsertakan dalam rapat musrenbang dan sosialisasi berkaitan dengan rencana anggaran dan pembelanjaan desa. Begitu juga dalam setiap kegiatan pembangunan telah dibuat laporan perkembangan proyek untuk menghindari adanya penyalahgunaan dana dan sumber daya.

Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Pada variabel ini hasil penelitian menunjukkan bahwa Komitmen Organisasi berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Hal tersebut diketahui dengan nilai t hitung = 4,034 > t tabel = 1,658 dan $\text{sig } 0,000 < 0,05$. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mada (2017), Masruhin (2019), Medianti (2018), Aulia (2018) yang menyatakan bahwa Komitmen Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa yang berarti bahwa semakin tinggi komitmen suatu organisasi, maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel. Perubahan besar dapat terjadi pada akuntabilitas pada sebuah organisasi melalui komitmen yang bagus untuk bekerja keras daripada lebih memperhatikan konstituen. Hal ini berarti komitmen yang baik dalam suatu organisasi desa akan mendorong keberhasilan pengelolaan dana desa yang akuntabel.

SIMPULAN

Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Samosir. Transparansi berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Samosir. Komitmen Organisasi berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Samosir.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, P. (2018). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten 50 Kota. *Psychology Applied to Work: An Introduction to Industrial and Organizational Psychology, Tenth Edition Paul*, 53(9), 1689–1699.
- Aziiz, M. N. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6(2), 334–344. <https://doi.org/10.17977/um004v6i22019p334>
- Badan Pusat statistik Samosir. (2020). <https://samosirkab.bps.go.id>
- CNN Indonesia. ICW Sebut Korupsi Dana Desa Kian Meningkat. <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20191116150502-20-448925/icw-sebut-korupsi-dana-desa-kian-meningkat> (17 November 2019)
- Detik News. ICW: ada 252 Kasus Korupsi Anggaran Desa, Desa Fiktif Harus Diusut!. <https://m.detik.com/news/berita/d-4786779/icw-ada-252-kasus-korupsi-anggaran-desa-desa-fiktif-harus-diusut> (16 November 2019)

- Dewi, C. K., Ikbal, M. A., & Moh, F. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Komitmen Organisasi terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Momunu Kabupaten Buol. *Pembangunan Daerah*, 1(2), 57–64.
- Griffin. (2019). *Komitmen Organisasi*. id.m.wikipedia.org
- Jumari, E. R., & Wahyudi, A. (2020). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Langam Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*. <http://jurnal.uts.ac.id/index.php/jmb/article/download/801/550>
- KOMPAS. *Sepanjang 2015- 2018, ICW Catat Ada 252 Kasus Korupsi di Desa*. <https://www.kompas.com/tren/read/2019/11/16/163922565/sepanjang-2015-2018-icw-catat-ada-252-kasus-korupsi-di-desa> (16 November 2019)
- Kurnianingrum, F. (2021). *Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2021*. 1–19.
- Linda Aryani, Anggia Kargenti Evanurul Maretih, Hijriyati Cucuani, Rita Susanti, & Yuliana Intan Lestari. (2013). Kompetensi Tidak Sempurna Tanpa Integritas pada Pemimpin. *Jurnal Psikologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau*, 9(Juni), 31–39.
- Lutfhi. (2018). Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa terhadap Manajemen Keuangan Desa dalam Meningkatkan Efektivitas Program Pembangunan Desa. *ISSN*, 1412-7083.
- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill,"* 8(2), 106–115. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17199>
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Jakarta : UPP STIM YKPN
- Masruhin, Anam & M. Elfan Kaukab. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat, dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Perangkat Desa di Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo). *Journal of Economic, Business and Engineering Vol. 1, No. 1*
- Medanbisnis. 2018. Dana Desa di Kabupaten Samosir Meningkat. <https://medanbisnisdaily.com>
- Medianti, Larastika. (2018). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Desa-Desa di Kabupaten Bintan). *JOM FEB. Volume 1 Edisi 1*
- Nurkhasanah. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang). *UIN Walisongo Semarang*, 1–162.
- Permendagri Nomor 20. (2018). *Pengelolaan Keuangan Desa*. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Pinterest. 2019. *Dugaan Korupsi Anggaran Dana Desa di Kabupaten Samosir*. <https://id.pinterest.com>
- Rahmah & Ardi. 2015. *Tata Kelola Pemerintahan Desa*. Surabaya : Pustaka
- Simbolon, Roida. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Transparansi, dan Komitmen Organisasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. <http://digilib.unimed.ac.id>

- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV
- Umaira, S., & Adnan, A. (2019). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pengawasan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Kabupaten Aceh Barat Daya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(3), 471–481. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v4i3.12580>
- Undang-Undang Nomor 13. (2003). Ketenagakerjaan. <https://kemenperin.go.id>
- Wibowo. (2017). *Manajemen Kinerja*. Depok: Rajawali Pers